

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Simbol Politik

1. Pengertian Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*)²¹. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya²².

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik²³. Namun, makna politik secara luas yang merupakan hasil dari pemikiran para filsuf tersebut hingga saat ini belum mampu memberi dampak terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik berbangsa dan bernegara yang baik dan benar sesuai konstitusi.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah

²¹Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. Hlm 2.

²²Basri Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 2.

²³Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 14.

tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif²⁴.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.²⁵ Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, and riches*)²⁶.

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara²⁷.

Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya²⁸. Menurut Eastone, Proses konversi (*conversion process*) dalam sistem

²⁴Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 3.

²⁵Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 18.

²⁶Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25.

²⁷Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni. Hlm 14-15.

²⁸Kantaprawira Rusadi. 1992. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm 160.

politik yang terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan mengubah masukan menjadi keluaran²⁹.

Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari input. Input terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (*intra* dan *extrasocietal*)³⁰. Sedangkan *input support* dalam sistem politik meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan untuk mendukung sistem politik dalam tiap-tiap tingkatan seperti masyarakat, politik, struktur pemerintahan, dan administrasi yang sedang melaksanakan kekuasaan pemerintah dan kebijaksanaan khusus pemerintah³¹. Namun demikian, di sisi lain, dukungan merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik³².

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya³³. Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.

²⁹Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 27.

³⁰*Ibid* Hlm 24.

³¹Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni. Hlm 23.

³²Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 24.

³³Kantaprawira Rusadi. 1992. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm 162.

2. Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
3. Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
4. Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukan oleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat.
5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan domestik maupun internasional.
6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional³⁴.

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain³⁵. Gabriel A. Almond mengatakan bahwa

³⁴Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 300-305.

proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif³⁶.

Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi³⁷. Fokus dari teori *Political Process Teory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*).³⁸

2. Pengertian Simbol Politik

Secara definitif yuridis sebenarnya simbol politik ini tidak ada penjelasannya, namun memang ada beberapa peraturan yang menyinggung terkait dengan adanya simbol-simbol dalam dunia politik di Indonesia seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 BAB I huruf D. Pengertian Umum angka 23 yang berbunyi “Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, symbol atau

³⁵Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 15.

³⁶Almond dalam Hijri S Yana. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press. Hlm 21.

³⁷Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hlm 179.

³⁸*Ibid.*

tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

Dalam peraturan lain yang mengatur terkait simbol politik tersebut adalah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud penulis adalah dalam BAB I angka 28 yang berbunyi “Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

Begitupun dalam Undang-undang Partai Politik, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyebutkan terkait dengan lambang. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 angka 4 huruf c yang menyebutkan “Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik”.

Namun dalam perkembangannya politik memiliki berbagai macam untuk memfasilitasi dirinya dalam eksis dimasyarakat, untuk itu simbol juga menjadi sasaran dalam cara untuk mencari simpatisan dan cara untuk memperoleh kekuasaan, dalam hal ini teori-teori yang paling mendukung terkait perkembangan politik yang berorientasi pada simbol-simbol politik adalah dari ilmu komunikasi politik.


Dapat dipahami bahwa simbol politik yang dimaksud penulis adalah bentuk-bentuk lain dari sikap politik warga negara, sehingga sorang warga negara dapat mengekspresikan sikap politiknya secara non-verbal. Segala hal yang dapat ditangkap

panca indra dan dapat membentuk pemikiran terhadap suatu hal yang lain. Pemaknaan sederhana adalah ketika seseorang melihat suatu simbol gambar, benda ataupun gestur yang bersifat politik maka seseorang yang melihat simbol gambar, benda ataupun gestur tersebut akan berfikir atau ingat terhadap parpol maupun paslon sesuai yang menjadi ciri khas simbol tersebut.


Dari pengertian diatas, realitasnya dalam pemilu beberapa tahun terakhir, penulis mencatat sejak dari Pilkada DKI Jakarta 2012 hingga Pilpres 2019 telah banyak hal-hal yang menjadi simbol politik, beberapa diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Simbol Politik dalam Bentuk Motif dan Warna Pakaian



	<p>Kemeja dengan motif kotak-kotak dengan warna merah biru yang digunakan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 Jokowi Dodo dan Basuki Tjahatja Purnama.</p>
	<p>Kemeja motif kotak-kotak dengan warna merah biru yang digunakan Jokowi Dodo dalam Pilpres 2014. Namun kali ini pasangannya, yaitu Jusuf Kalla tidak menggunakan Kemeja dengan motif yang sama.</p>
	<p>Kemeja putih polos yang digunakan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam kontestasi pilpres 2014.</p>


	<p>Kemeja biru muda dengan bawahan cream yang digunakan oleh calon wakil presiden Sandiaga Uno dalam gelaran pilpres 2019. Namun pasangannya, yaitu Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian yang sama.</p>
---	--

Tabel 2.2 Simbol Politik dalam Bentuk Logo



	<p>Logo identik dengan warna pelangi yang digunakan oleh paslon nomor urut 01 dalam pilpres 2019.</p>
	<p>Logo garuda merah yang digunakan oleh paslon Prabowo-Hatta pada pilpres 2014. Dalam pilpres 2019 yang kembali menemukan antara Prabowo dengan Jokowi, logo ini digunakan kembali.</p>

Tabel 2.3 Simbol Politik dalam Bentuk Slogan



	<p>Slogan “Adil dan makmur” ini digunakan oleh pasangan calon Prabowo-Sandi dalam pilpres 2019 sebagai salah satu visi dan misinya, yaitu mewujudkan Indonesia dalam Kemakmuran yang berkeadilan.</p>
	<p>Slogan “Indonesia hebat!” ini digunakan oleh paslon Jokowi-JK dalam pilpres 2014 sebagai visi misi utamanya, yaitu menciptakan Indonesia yang hebat.</p>

	<p>Slogan “Bersih, merakyat, kerja nyata” ini digunakan dalam gelaran pilpres 2019 oleh Joko Widodo. Uniknya bahwa slogan ini mencitrakan seorang Joko Widodo secara Individu, bukan secara pasangan calon.</p>
---	---

Tabel 2.4 Simbol Politik dalam Bentuk *Gesture*

	<p>Gestur jari yang digunakan oleh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Gestur ini menggambarkan nomor urut mereka yaitu 01 (mengacungkan satu jari, yaitu jari jempol).</p>
	<p>Gestur jari yang digunakan oleh paslon nomor urut 02. Gesture ini menggambarkan nomor urut mereka yaitu 02 dengan mengacungkan 2 jari, yaitu ibu jari dan jari telunjuk.</p>

Tabel 2.5 Simbol Politik dalam Bentuk Penggunaan Tagar oleh Relawan

	<p>Penggunaan tagar #2019GantiPresiden di sosial media merupakan simbol ataupun bentuk dukungan dari relawan/simpatian kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.</p>
	<p>Setelah penggunaan tagar #2019GantiPresiden oleh relawan Prsbowo-Sandi, anggota relawan dari Jokowi-Ma'ruf juga membuat tagar tandingan</p>

Simbol merupakan elemen penting sebagai penyambung lidah secara non-verbal kepada masyarakat oleh masing-masing palon maupun partai politik, namun terlebih dari pada itu dalam komunikasi politik hal tersebut juga merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi.

Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik. Komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik³⁹.

3. Simbol Politik Dalam Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan *public opinion* dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah⁴⁰.

a) Membangun Citra Politik

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang

³⁹Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24

⁴⁰Ardial, 2010: 44

kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual⁴¹.

b) Membentuk dan Membina Pendapat Umum

Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik⁴². Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan.

Keanggotaan organisasi politik dan quasi politik dapat melibatkan seseorang dalam komunikasi politik yang hanya bersifat sementara; akan tetapi para partisipan yang ikut terlibat dalam 23 komunikasi menjadi lebih akrab, di mana informasi diteruskan secara vertikal dari para pemegang posisi yang lebih tinggi dalam suatu hierarki partisipasi, dan diteruskan secara horisontal antara para anggota aktivis pada tingkatan yang sama, baik sebagai anggota suatu organisasi yang sama, maupun antara sesama organisasi. Dibandingkan dengan media massa yang dapat dianggap sebagai sarana umum dari komunikasi politik, maka kelompok kepentingan dan

⁴¹Anwar Arifin, 2006: 1

⁴²Anwar Arifin, 2006: 11

partai-partai politik itu lebih khusus dan lebih sering terlibat dalam proses komunikasi⁴³.

Pendapat umum sebagai kekuatan politik tidak hanya mampu mendukung suatu pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk menggulingkannya. Seperti apa yang dialami oleh Soekarno, Soeharto dan Abd. Rahman Wahid, baik melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui pergolakan-pergolakan atau aksi-aksi massa, atau kedua-keduanya (aksi massa dan parlemen). Sehingga pendapat umum harus dapat dibentuk, dipelihara, dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui komunikasi politik yang intensif, persuasif ataupun informatif, edukatif dan koersif⁴⁴.

c) Mendorong Partisipasi Politik Partisipasi politik

Sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik)⁴⁵. Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Dalam kajian ilmu komunikasi memang banyak teori yang menyebutkan keterkaitan penggunaan simbol-simbol dengan makna yang di timbulkan oleh simbol tersebut bagi orang yang melihatnya. Salah satu teori dalam ilmu komunikasi yang menurut hemat penulis bisa menjembatani permasalahan ini adalah teori *Triangle Meaning* yang dikemukakan oleh Piecre. Teori *Triangle Meaning* ini secara

⁴³Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 259-260

⁴⁴Anwar Arifin, 2006: 13

⁴⁵Anwar Arifin, 2006: 11

sederhana dibagi menjadi tiga hal, yaitu *sign*, *object*, dan *interpretant*. Yang dimaksud dengan 3 objek tersebut adalah⁴⁶:

a. *Sign* (tanda)

Tanda yang dimaksud adalah sesuatu fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (mepemaknaankan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan tanda ini disebut objek.

b. *Object* (objek)

Object atau Objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.

c. *Interpretant* (interpretan)

interpretan adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah⁴⁷. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam

⁴⁶ Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa” Semiotika Dalam Metode Penelitian Komunikasi *Semiotics In Research Method of Communication*” Bambang Mudjiyanto1 & Emilsyah Nur2 Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar. Volume 16 No. 1 – April 2013. Hal. 76

⁴⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan⁴⁸.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan⁴⁹.

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara⁵⁰. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara⁵¹.

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif perluasan pengertian:

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

⁴⁸*Ibid* Pasal 1 angka 2

⁴⁹*Ibid* Pasal 1 angka 3

⁵⁰Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 10

⁵¹W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, halaman 702

Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri.

Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut⁵²;

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain⁵³.

b. Pengertian Ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu⁵⁴. Ketentuan

⁵²Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 95

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*, hlm 10

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta⁵⁵.

2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Kedudukan dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

- a. Kedudukan Aparatur Sipil negara
 - 1) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara
 - 2) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah
 - 3) ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

⁵⁵*Ibid*

b. Hak Aparatur Sipil Negara

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus*, dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo adminitratikus* dan *organization man*⁵⁶.

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu:

- a. kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidup
- b. kebutuhan untuk tumbuh, berkembang dan belajar⁵⁷.

C. Tindak Pidana Pemilu

1. Tindak Pengertian Pidana Pemilu

Berbicara tentang hukum pidana tidak terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana, kesalahan, dan pidana, serta korban⁵⁸.

⁵⁶Sondang P Siagian, 1996, *Filsafat administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 9-10

⁵⁷Burhanudin A Tayibnapis, 1986, *Administrasi Kepegawaian*; Suatu Tinjauan Analitik, Pradnya Paramitha, Jakarta hlm.348-350

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een geldelte van de werkelijkheid* sedang *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan atau tindakan⁵⁹.

Secara doktrinal, di antara para hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang pengertian dan unsur-unsur pidana, sebagian ahli hukum menganut pandangan monistis yang tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dan sebagian yang lain menganut pandangan dualistis yang memisahkan *criminal act* dan *criminal responsibility*⁶⁰.

Pendapat ahli yang berpandangan monistis antara lain :

- a. Menurut Simon, *starfbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁶¹.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- c. Profesor van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak tersebut. Menurut

⁵⁸Usfah Moch Najih dan Togat, *Penghantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal 32.

⁵⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 172.

⁶⁰Usfah Moch Najih dan Togat, *Op.cit*, hal 34-35.

⁶¹Lamintang, *Op.cit*, hal 176.

beliau, perkataan “*starfbaar*” itu berarti mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *starfbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan”, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum⁶².

Pendapat ahli yang menganut pandangan dualistis adalah:

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut⁶³.
- b. Menurut W.P.J. Pompe, *starfbaarfeit* adalah tindak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut teori *starfbaarfeit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana⁶⁴.
- c. Sedangkan menurut Soedarto, tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana⁶⁵.

Tindak pidana Pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagai berikut:

⁶²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 1

⁶³Usfah Moch Najih dan Togat, *Op.cit*, hal 35

⁶⁴Soedarto, *Penghantar Kuliah Hukum Pidana* Jilid IA-IB, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 2001, hal 40-41.

⁶⁵Loc.Cit.

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah Tindak Pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu⁶⁶. Pembentuk KUHP kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. Sintong Silaban⁶⁷.

Menurut Djoko Prakoso⁶⁸ menguraikan bahwa pengertian Tindak Pidana Pemilu dengan :

“Setiap orang, badan hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”

Sedangkan menurut Topo Santoso⁶⁹ memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu, yakni :

⁶⁶Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 1.

⁶⁷Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal 48-53.

⁶⁸Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal 148.

“Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.”

UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat juga istilah Tindak Pidana Pemilu dalam Pasal 29, 31, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99, dan Pasal 102. Namun tidak ada satupun pasal yang memberikan definisi apa itu Tindak Pidana Pemilu.

2. Unsur Pidana Pemilu dalam KUHP

Pembagian dewasa ini yang kita kenal sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang oleh para pembentuk dari KUHP kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Menurut van Hamel, pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*wetsdelicten*”. Sedangkan yang dimaksud dengan “*wetsdelicten*” itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang dipantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan perundang-undangan⁷⁰.

Pembagian delik pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku kedua dan buku ketiga melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana sebagai keseluruhan⁷¹.

⁶⁹Topo Santoso, Op.Cit, hal 5.

⁷⁰*Ibid*, hal. 210

⁷¹Lamintang, Op.Cit, hal 211.

Membantu kejahatan merupakan tindak pidana sedangkan membantu melakukan pelanggaran bukan merupakan tindak pidana. Dan tindak pidana yang mungkin dimuat dalam peraturan legislatif di daerah otonom semuanya masuk pelanggaran⁷².

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Delik Formal dan Delik Materiil (Delik dengan perumusan secara formil dan dengan perumusan secara materiil)⁷³
 - a. Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.
 - b. Delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah delik baru dianggap selesai (*vooltoid*) dengan timbulnya akibat yang dliarang.
- 2) Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionis commisa*⁷⁴
 - a. *Delik commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. *Delik ommissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, misal yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
 - c. Delik *commissions per ommissionis commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dua delik *commissionis*), akan tetapi dilakukan

⁷²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Asy Syamil, Gema Insani, Jakarta, 2000, hal 42.

⁷³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 75-76.

⁷⁴Soedarto, Op.Cit, hal 51.

dengan cara tidak berbuat. Misal yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.

3) Delik dolus dan delik culpa⁷⁵

- a. Delik dolus: delik yang memuat semua unsur kesengajaan, misal Pasal 187, 197 KUHP.
- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal Pasal 195, 201 KUHP.

4) Delik Tunggal dan delik berganda⁷⁶

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHP.

5) Delik aduan dan bukan delik aduan⁷⁷

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misal Pasal 284 KUHP.

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya :

- Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan.
- Delik aduan yang relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

6) Delik sederhana dan delik yang ada pembedanya⁷⁸

- a. Delik sederhana: misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

⁷⁵*Ibid*, hal 52

⁷⁶*Loc.Cit*

⁷⁷Frans Maramis, Op.Cit, hal 76.

⁷⁸Soedarto, Op.Cit, hal 53.

- b. Delik yang ada pembenarannya: misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP)

7) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi)⁷⁹

Tindak pidana ekonomi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi.

8) Kejahatan ringan⁸⁰ Dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan: Pasal 302 (1), 315, 352, 364, 373, 375, 482.

Menurut Lamintang yang dimaksud unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁸¹.

Masih menurut Lamintang, unsur-unsur Subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁸²:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁷⁹*Loc.Cit.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 193.

⁸²*Ibid*, hal 194.

- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁸³:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tidak kurang dari lima pasal dari titel IV ini mengenai tindak-tindak pidana yang ada hubungan dengan suatu Pemilu yang diadakan berdasar atas undang-undang⁸⁴. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan”, adalah Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP⁸⁵.

⁸³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 194.

⁸⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 215.

⁸⁵Topo Santoso, Op.Cit, hal 11.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Merintangi Orang Menjalankan Haknya dalam memilih Pasal 148 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Tindak pidana menghalangi orang lain mempergunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan dengan bebas dan secara tidak terganggu yang diatur dalam Pasal 148 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut⁸⁶ :

- a. Unsur subjektif : opzettelijk, artinya dengan sengaja.
- b. Unsur objektif :
 1. Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
 3. Menghalangi atau merintangi seseorang;
 4. Mempergunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu.

- 2) Penyuapan Pasal 149 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturanaturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁸⁶Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cetakan I, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 344.

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP itu hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni⁸⁷ :

1. Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
 2. Menyuap orang lain dengan pemberian atau janji;
 3. Agar orang lain tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya atau agar ia mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu
- 3) Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 150 KUHP tersebut di atas hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni⁸⁸ :

1. Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan suatu peraturan umum;
 2. Melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya menipu;
 3. Hingga suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau;
 4. Hingga orang lain daripada yang dimaksudkan oleh pemilih menjadi terpilih.
- 4) Mengaku Sebagai Orang Lain

⁸⁷*Ibid*, hal 357.

⁸⁸*Ibid*, hal 373.

Pasal 151 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 151 KUHP tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut⁸⁹ :

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 1. Mengakui dirinya sebagai orang lain
 2. Turut serta dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan suatu peraturan umum.
 3. Melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu;
 4. Yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain;
 5. Lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah.

2. Pidana Pemilu Dalam Undang-undang Pemilu 2017

Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat pada Buku Kelima Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari Bab I Penanganan Tindak Pemilu dan Bab II Ketentuan Pidana Pemilu. Pada Bab I Penanganan Tindak Pemilu terdiri dari Bagian Kesatu Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang memuat 9 (sembilan) pasal yaitu Pasal 476 hingga Pasal 484, kemudian Bagian Kedua Majelis Khusus Tindak Pidana

⁸⁹*Ibid*, hal 377.

Pemilu yang hanya memuat 1 (satu) pasal yaitu Pasal 485, dan bagian terakhir yaitu Bagian Ketiga Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang memuat 2 (dua) pasal yaitu Pasal 486 dan 487. Pada Bab II Ketentuan Pidana Pemilu memuat 67 (enam puluh tujuh) pasal yaitu Pasal 488 hingga Pasal 554.⁹⁰

Sementara jenis-jenis tindak pidana pemilu sendiri dalam Undang-undang Pemilu 2017 yang terdapat dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu:

- a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih; Pasal 488 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.
 - b. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; Pasal 490 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu; Pasal 491 “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau

⁹⁰ Jurnal Hukum *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat* Ismail dan Fakhri Lutfianto Hapsoro Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Volume 35, Nomor 1 Juni 2019 Hal. 61

mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU; Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye; Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu; Pasal 496 “Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”. Pasal 497 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; Pasal 510 “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan; Pasal 514 “Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta”.
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali. Pasal 516 “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta”.

Pemilihan umum yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) terdapat pada Pasal 1 ayat (2), pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.⁹¹

⁹¹ *Ibid*, hal 302.